



15 Ton Sampah Berceceran Setiap Hari

PHRI Khawatirkan Wisatawan Tak Betah di Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta harus berjuang ekstra keras untuk menyalurkan sampah di jalanan setiap harinya. Meski operasional depo dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah diperluas, masih saja ada warga yang abai membuang sampah di tempat-tempat terlarang.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko, mengatakan, per hari ini petugas yang diterjunkan ke lapangan menyalurkan 15 ton sampah dari jalanan. Meski rata-ratanya sudah mengalami penurunan dibanding sebelumnya, ia menyebut, jumlah tersebut masih cenderung sangat besar.

"Meski sudah ada operasi yustisi, tapi ternyata itu belum sepenuhnya hilang. Jumlah 15 ton itu termasuk di jalan-jalan penghubung juga, tidak hanya jalan protokol," katanya, Kamis (28/9).

Dijelaskannya, DLH terus mendorong masyarakat supaya memboyong sampahnya menuju depo-depo terdekat, dengan catatan kondisinya sudah terpilah.

Sejumlah depo yang kondisinya hampir over kapasitas pun diupayakan rekayasa, agar sanggup menerima alokasi limbah dari penduduk. "Sekarang yang masuk (TPA) Piyungan hanya 135 ton, sehingga banyak sampah yang harus menginap lebih lama lagi di depo," terangnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singih Raharjo, menyampaikan, operasi yustisi yang ditempuh jajaran Satpol PP bersama kemantren dan keurahan mulai membuahkan hasil. Berdasarkan pantauannya, beberapa titik yang sebelumnya menjadi lokasi favorit pembuangan liar limbah, saat ini sudah dalam kondisi bersih.

"Sudah menurun signifikan. Penegakan aturan sudah membuahkan hasil. Semoga kesadaran warga bisa terus meningkat dan ke depan tidak ada lagi limbah yang dibuang di jalan," ucapnya.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menuturkan, darurat sampah yang terjadi di masa ramai wisatawan asing ini menjadi preseden buruk bagi Kota Yogyakarta, sebagai salah satu destinasi favorit di Indonesia.

Dengan banyaknya sampah yang berceceran, para wisatawan mancanegara pun berpotensi tak mau lagi berlama-lama singgah di Kota Pelajar dan mencari daerah lain untuk menghabiskan liburannya.

"Sampal November nanti banyak turis asing yang datang ke Yoga, dan mereka mulai mengeluhkan itu. Kalau ini tidak segera diantisipasi, ya, bakalan repeat," urainya, Kamis (28/9).

Menurut Deddy dampak negatifnya pun tidak hanya dirasakan oleh para pelaku industri pariwisata, namun juga pemerintah daerah secara tidak langsung. Bagaimana tidak, ketika lama tinggal (*length of stay*) wisatawan menurun, potensi untuk mengerek tingkat belanja pelancong, khususnya dari turis mancanegara, otomatis mengalami kendala besar.

"Imbasnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurun. Makanya, ini warning bagi kita semua. Termasuk para anggota PHRI dan warga masyarakat, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sampah," katanya.

Karena itu, pihaknya pun mendorong para anggota PHRI supaya tertib menjalankan regulasi terkait proses pengelolaan sampah secara mandiri, supaya tidak berkontribusi dalam penumpukan limbah di jalanan.

Bahkan, satuan tugas (satgas) pun dibentuk secara khusus untuk memantau sepak terjang perhotelan dan restoran di sektor persampahan.

"Itu kita pantau betul. Tidak mungkin PHRI hanya mendorong dan meminta solusi dari pemerintah, tapi kita sendiri tidak melaksanakan regulasi pengelolaan sampah," pungkasnya.

PEKERJAAN RUMAH

- DLH Kota Yogyakarta berjuang ekstra keras untuk menyalurkan sampah di jalanan setiap harinya.
- Hingga kini, masih banyak warga yang abai membuang sampah di tempat-tempat terlarang.
- Petugas menyalurkan 15 ton sampah dari jalanan.
- PHRI khawatir berdampak pada wisata DIY

si untuk mengerek tingkat belanja pelancong, khususnya dari turis mancanegara, otomatis mengalami kendala besar.

"Imbasnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurun. Makanya, ini warning bagi kita semua. Termasuk para anggota PHRI dan warga masyarakat, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sampah," katanya.

Karena itu, pihaknya pun mendorong para anggota PHRI supaya tertib menjalankan regulasi terkait proses pengelolaan sampah secara mandiri, supaya tidak berkontribusi dalam penumpukan limbah di jalanan.

Bahkan, satuan tugas (satgas) pun dibentuk secara khusus untuk memantau sepak terjang perhotelan dan restoran di sektor persampahan.

"Itu kita pantau betul. Tidak mungkin PHRI hanya mendorong dan meminta solusi dari pemerintah, tapi kita sendiri tidak melaksanakan regulasi pengelolaan sampah," pungkasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Negatif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005